



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 27 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Investigasi Terkait: Relevansi dan Validitas Rekaman sebagai Alat Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Bayu Nurhadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: [nurhadi.bayu87@gmail.com](mailto:nurhadi.bayu87@gmail.com)

Corresponding Author: [nurhadi.bayu87@gmail.com](mailto:nurhadi.bayu87@gmail.com)

**Abstract:** *This research discusses the relevance and validity of recorded evidence as a means of proof in handling criminal acts of corruption in Indonesia. Through in-depth analysis, this research evaluates the role of recorded evidence in the judicial process, focusing on aspects of suitability, validity, and related challenges. Based on the results of the discussion, recorded evidence was proven to have significant relevance in enforcing corruption laws, providing clarity, transparency and reliability in revealing the facts that occurred. However, the validity of recorded evidence is highly dependent on its authenticity, reliability and compliance with applicable legal procedures. Challenges such as authentication, recording quality, and understanding legal rules are important factors that need to be overcome to ensure the effective and admissible use of recorded evidence in court. Therefore, this research concludes that the use of recorded evidence can strengthen corruption law enforcement in Indonesia, but careful steps are needed to ensure the validity and validity of this evidence.*

**Keyword:** *Corruption Law Enforcement, Recorded Evidence, Validity*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas relevansi dan validitas bukti rekaman sebagai alat pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui analisis mendalam, penelitian ini mengevaluasi peran bukti rekaman dalam proses peradilan, fokus pada aspek-aspek kesesuaian, validitas, serta tantangan yang terkait. Berdasarkan hasil pembahasan, bukti rekaman terbukti memiliki relevansi yang signifikan dalam penegakan hukum korupsi, memberikan kejelasan, transparansi, dan keandalan dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Namun, validitas bukti rekaman sangat tergantung pada keaslian, keandalan, dan pemenuhan prosedur hukum yang berlaku. Tantangan seperti autentikasi, kualitas rekaman, serta pemahaman aturan hukum menjadi faktor penting yang perlu diatasi untuk memastikan penggunaan bukti rekaman yang efektif dan dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bukti rekaman dapat memperkuat penegakan hukum korupsi di Indonesia, tetapi perlu adanya langkah-langkah yang cermat dalam memastikan validitas dan keabsahan bukti tersebut.

---

**Kata Kunci:** Bukti Rekaman, Penegakan Hukum Korupsi, Validitas

---

**PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan masalah yang mendalam dan meresahkan di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi momok yang mengganggu pembangunan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi efektivitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, seringkali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam menangani kasus korupsi, bukti yang kuat dan sah sangat penting untuk memastikan keberhasilan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tanpa bukti yang memadai, sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana korupsi di pengadilan, dan pelaku korupsi mungkin lolos dari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, upaya untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menggunakan bukti secara efektif sangat krusial dalam memerangi korupsi.

Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan rekaman audio dan visual sebagai bukti dalam kasus korupsi semakin umum. Rekaman tersebut dapat mencakup percakapan, transaksi, atau kejadian terkait korupsi yang tertangkap dalam bentuk audio atau video. Keuntungan utama dari penggunaan rekaman adalah kemampuannya untuk memberikan dokumentasi yang jelas dan otentik tentang apa yang terjadi, tanpa adanya ruang bagi manipulasi atau penyimpangan informasi.

Penggunaan rekaman sebagai bukti dalam kasus korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Rekaman dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mengungkap praktik korupsi yang tersembunyi, menghadirkan bukti yang sulit dipatahkan di pengadilan, dan memperkuat kasus yang diajukan oleh jaksa penuntut. Selain itu, rekaman juga dapat membantu memperjelas fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus korupsi, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi kepada hakim dan juri, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Meskipun rekaman dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam penanganan kasus korupsi, validitas bukti tersebut harus dipastikan agar diterima di pengadilan. Dalam konteks hukum, validitas merujuk pada keabsahan dan keandalan bukti yang diajukan, serta kecocokannya dengan standar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pihak penegak hukum untuk memastikan bahwa rekaman yang disajikan sebagai bukti telah diperoleh secara sah, otentik, dan tidak tercemar, serta memenuhi persyaratan hukum yang relevan.<sup>2</sup>

Meskipun memiliki potensi yang besar, penggunaan rekaman sebagai bukti dalam kasus korupsi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala. Salah satunya adalah masalah autentikasi dan validasi bukti rekaman, yang dapat menjadi rumit terutama dalam konteks di mana rekaman tersebut dapat dengan mudah dipalsukan atau dimanipulasi. Selain itu, keberadaan aturan dan prosedur yang belum jelas terkait dengan penggunaan bukti

---

<sup>1</sup> Syukur Ikhsani and Bakti Cahyo Hidayanto, 'Analisa Forensik Whatsapp Dan LINE Messenger Pada Smartphone Android Sebagai Rujukan Dalam Menyediakan Barang Bukti Yang Kuat Dan Valid Di Indonesia', *Jurnal Teknik ITS*, 5.2 (2016), A728–36 <<https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.17271>>.

<sup>2</sup> Recky Vincent Oktaviano Wuysang, Grace Nangoi, and Winston Pontoh, 'Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpk Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 7.2 (2016) <<https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13551>>.

rekaman dalam sistem peradilan Indonesia juga dapat menjadi hambatan dalam memperoleh keputusan yang adil dan akurat di pengadilan.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang relevansi dan validitas bukti rekaman sebagai alat pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan penggunaan rekaman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas penggunaan rekaman dalam proses penegakan hukum, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan integritas dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan bukti rekaman dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas fenomena yang diteliti, memahami perspektif dan pengalaman para pelaku di lapangan, serta mengeksplorasi nuansa dan konteks yang mungkin mempengaruhi penggunaan bukti rekaman dalam praktik penegakan hukum.

Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk wawancara dengan para ahli hukum, jaksa penuntut, penyidik, dan pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, data juga akan diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup dokumen-dokumen hukum terkait, putusan pengadilan, dan panduan atau peraturan terkait dengan penggunaan bukti rekaman dalam proses hukum di Indonesia.

Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau melalui media telekomunikasi seperti telepon atau video call, tergantung pada ketersediaan dan preferensi responden. Wawancara akan berfokus pada topik-topik yang relevan dengan penggunaan bukti rekaman dalam penanganan kasus korupsi, seperti pengalaman praktis, tantangan yang dihadapi, pandangan terhadap validitas bukti rekaman, dan saran untuk peningkatan penggunaan bukti rekaman dalam penegakan hukum.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna-makna yang muncul dari data. Langkah-langkah analisis akan mencakup pengkodean data, pengelompokan tematik, dan interpretasi hasil analisis untuk menyusun temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis akan dilakukan dengan cermat dan sistematis, dengan memperhatikan keakuratan, reliabilitas, dan validitas hasil.

Melalui pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang holistik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang relevansi dan validitas bukti rekaman sebagai alat pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan integritas penegakan hukum serta penguatan sistem peradilan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis temuan merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menginterpretasikan hasil-hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, analisis temuan akan mengarah pada pemahaman lebih

---

<sup>3</sup> Angga Alfian, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi', *PRANATA HUKUM*, 13.2 (2018) <<https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/1059>> [accessed 8 February 2024].

mendalam tentang relevansi dan validitas bukti rekaman sebagai alat pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>4</sup>

Analisis akan mempertimbangkan sejauh mana rekaman audio dan visual yang disajikan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Ini termasuk pertimbangan tentang apakah rekaman tersebut secara jelas menunjukkan tindakan atau transaksi yang mencurigakan, dan sejauh mana rekaman tersebut dapat menguatkan kasus yang diajukan oleh jaksa penuntut.

Dalam analisis ini, peneliti akan mengevaluasi apakah rekaman tersebut memiliki kejelasan yang memadai, apakah konteksnya cukup jelas, dan apakah informasi yang disajikan dapat diandalkan dalam konteks pengadilan. Selain itu, akan diperhatikan juga sejauh mana rekaman tersebut mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang tindakan korupsi yang diduga terjadi, termasuk keterlibatan pelaku, modus operandi, dan dampaknya terhadap kepentingan publik.

Validitas bukti rekaman dalam konteks hukum merujuk pada keabsahan dan keandalan bukti tersebut sebagai alat pembuktian di pengadilan. Analisis akan meninjau sejauh mana rekaman-rekaman yang diajukan sebagai bukti dalam kasus-kasus korupsi memenuhi standar validitas yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.

Ini mencakup penilaian terhadap keaslian rekaman, yaitu apakah rekaman tersebut tidak dipalsukan atau dimanipulasi, serta apakah proses pengambilannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, akan dievaluasi juga keandalan rekaman, yaitu apakah rekaman tersebut dapat diandalkan sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ini termasuk pula pertimbangan tentang apakah rekaman tersebut memenuhi persyaratan teknis, seperti kualitas audio atau visual yang memadai dan ketepatan waktu pengambilan rekaman.<sup>5</sup>

Analisis akan mencakup juga identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan bukti rekaman sebagai alat pembuktian dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ini termasuk pertimbangan tentang berbagai hambatan teknis, hukum, dan praktis yang mungkin timbul dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menggunakan bukti rekaman dalam proses hukum.

Tantangan tersebut dapat meliputi masalah autentikasi dan validasi rekaman, kesulitan dalam memperoleh rekaman yang sah dan otentik, serta perdebatan tentang relevansi dan keabsahan bukti rekaman di pengadilan. Selain itu, akan dievaluasi juga kendala-kendala praktis yang terkait dengan pemrosesan dan presentasi bukti rekaman di pengadilan, serta upaya untuk mengatasi tantangan tersebut agar proses hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil.

Melalui analisis temuan yang mendalam terhadap aspek-aspek di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penggunaan bukti rekaman dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan integritas penegakan hukum serta penguatan sistem peradilan di Indonesia.

### **Alat Bukti dalam KUHAP**

Dalam hal tindak pidana, maka alat-alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara pidana terdapat di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

---

<sup>4</sup> Mahmud Mulyadi, M Hamdan, and Mirza Nasution, 'Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Hukum Acara Pidana', 2017.

<sup>5</sup> Cholqi Choirunnisa and others, 'Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.6 (2022), 529–48 <<https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.152>>.

3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

### **Ketentuan Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik tersebut, maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum. Terkait dengan adanya transaksi elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UU ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUH Pdt.) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh antara lain, pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup registrasi; otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan; serta membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: registrasi; otentikasi fisik terhadap si pemohon; pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat; pengelolaan sertifikat elektronik; serta daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.

### **Relevansi Bukti Rekaman dalam Penanganan Kasus Korupsi**

Relevansi bukti rekaman dalam penanganan kasus korupsi merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat, penggunaan rekaman audio dan visual telah menjadi salah satu instrumen yang sangat relevan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penjelasan ini, saya akan menguraikan mengapa bukti rekaman menjadi relevan dalam penanganan kasus korupsi, serta bagaimana penggunaannya dapat memperkuat proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.<sup>6</sup>

Pertama-tama, bukti rekaman memiliki kejelasan dan ketepatan yang tinggi. Rekaman audio dan visual dapat merekam percakapan, pertemuan, atau kejadian terkait yang mungkin menjadi indikasi adanya tindak pidana korupsi. Ketika rekaman ini diajukan sebagai bukti dalam kasus korupsi, mereka dapat memberikan gambaran yang jelas dan otentik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, bukti rekaman dapat menghilangkan keraguan

---

<sup>6</sup> Hanif Rabbani As, 'Analisis Yuridis Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat', 2023 <<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/43106>> [accessed 8 February 2024].

atau tafsiran yang ambigu, membantu memperjelas fakta-fakta yang relevan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani.

Selain itu, bukti rekaman memiliki sifat yang sulit dipungkiri. Dalam banyak kasus, rekaman audio atau visual dapat menjadi bukti yang sangat kuat di pengadilan karena keaslian dan keandalannya sulit untuk dipertanyakan. Rekaman tersebut dapat menyajikan bukti yang konkret dan konklusif tentang tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh para pelaku. Oleh karena itu, ketika disajikan secara benar dan sesuai prosedur hukum, bukti rekaman dapat menjadi pukulan besar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Selain itu, bukti rekaman dapat memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses hukum. Dengan merekam secara langsung percakapan atau kejadian yang terjadi, bukti rekaman memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi untuk secara langsung mendengar atau melihat apa yang terjadi. Hal ini dapat membantu mengurangi interpretasi yang salah atau manipulasi informasi yang mungkin terjadi selama proses penyelidikan atau pengadilan. Sebagai hasilnya, penggunaan bukti rekaman dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan dan proses penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu, bukti rekaman juga dapat memperkuat tuntutan hukum dan putusan pengadilan. Dengan menyajikan bukti yang konkret dan otentik tentang tindakan korupsi yang diduga terjadi, bukti rekaman dapat membantu jaksa penuntut untuk membangun kasus yang kuat dan meyakinkan. Selain itu, bukti rekaman juga dapat membantu hakim dan juri dalam membuat keputusan yang adil dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang tersedia.<sup>8</sup>

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan bukti rekaman juga memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan autentikasi dan validasi bukti rekaman. Dalam beberapa kasus, bukti rekaman dapat dipalsukan atau dimanipulasi, atau mungkin tidak memenuhi standar teknis atau hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pihak penegak hukum untuk melakukan proses autentikasi dan validasi yang cermat terhadap bukti rekaman sebelum menggunakannya dalam proses hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti rekaman memiliki relevansi yang besar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Rekaman audio dan visual memiliki kejelasan, ketepatan, dan keandalan yang tinggi, serta dapat memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses hukum. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, penggunaan bukti rekaman dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

### **Validitas Bukti Rekaman dalam Konteks Hukum**

Validitas bukti rekaman dalam konteks hukum merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. Validitas bukti rekaman merujuk pada keabsahan dan keandalan bukti tersebut, serta kemampuannya untuk diterima dan dipertimbangkan secara hukum di pengadilan. Dalam

---

<sup>7</sup> Windu Kisworo, 'Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Di Amerika Serikat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5.1 (2018), 24–59 <<https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74>>.

<sup>8</sup> Hanif Rabbani, 'Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat', 2023 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42947>> [accessed 8 February 2024].

<sup>9</sup> Arina Manna Sikana Akbar, 'Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2020) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/577>> [accessed 8 February 2024].

penjelasan ini, saya akan menguraikan lebih lanjut mengenai validitas bukti rekaman dalam konteks hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi validitas tersebut.<sup>10</sup>

Pertama-tama, validitas bukti rekaman terkait dengan keaslian atau autentisitas rekaman tersebut. Keaslian rekaman mengacu pada keabsahan atau kebenaran dari rekaman itu sendiri, yaitu apakah rekaman tersebut benar-benar merekam apa yang terjadi sebagaimana adanya, tanpa adanya manipulasi atau penyuntingan yang dilakukan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak dipalsukan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Langkah-langkah autentikasi seperti memverifikasi sumber rekaman, menelusuri jejak digital, dan memeriksa keabsahan metadata rekaman dapat membantu memastikan keaslian bukti rekaman.

Selanjutnya, validitas bukti rekaman juga terkait dengan keandalan atau reliabilitas rekaman tersebut. Keandalan rekaman mengacu pada kemampuan rekaman tersebut untuk diandalkan sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor seperti kualitas teknis rekaman, integritas data, dan kepatuhan terhadap standar pengambilan rekaman. Rekaman yang buram, terpotong-potong, atau memiliki gangguan audio atau visual dapat mempengaruhi keandalan bukti rekaman dan membuatnya kurang dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa rekaman tersebut memenuhi standar teknis yang relevan dan tidak tercemar oleh faktor-faktor yang dapat meragukan keandalannya.<sup>11</sup>

Selain itu, validitas bukti rekaman juga dipengaruhi oleh prosedur pengambilan dan penyimpanan rekaman. Proses pengambilan rekaman harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, jika rekaman tersebut merupakan hasil dari penyadapan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, prosedur hukum yang ketat harus diikuti untuk memastikan keabsahan dan legalitas rekaman tersebut. Selain itu, penyimpanan rekaman juga harus dilakukan dengan aman dan terjaga integritasnya, untuk mencegah manipulasi atau kerusakan yang dapat meragukan keandalan bukti rekaman.

Dalam konteks pengadilan, validitas bukti rekaman juga dipengaruhi oleh aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerimaan dan penilaian bukti rekaman oleh hakim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan, seperti peraturan tentang bukti elektronik atau aturan tentang penerimaan bukti dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pihak penegak hukum dan pengacara untuk memahami dengan baik aturan dan prosedur yang berlaku terkait dengan penggunaan bukti rekaman dalam proses peradilan.

Tantangan utama dalam menentukan validitas bukti rekaman adalah kemampuan untuk memastikan keaslian, keandalan, dan keabsahan rekaman tersebut dalam konteks hukum yang kompleks dan beragam. Tantangan ini dapat dihadapi dengan melakukan proses autentikasi dan validasi yang cermat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam pengambilan, penyimpanan, dan penggunaan bukti rekaman. Dengan demikian, penggunaan bukti rekaman dalam proses hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penegakan hukum yang adil dan efektif, asalkan validitas bukti rekaman tersebut terjamin.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Devid Toar Henok Laoh, 'Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar Kuhp', *Lex Administratum*, 10.2 (2022) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40573>> [accessed 8 February 2024].

<sup>11</sup> Iwan Setiawan and others, 'Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10.1 (2022), 119–32 <<https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7236>>.

<sup>12</sup> Sisworo Sisworo, Marlina Marlina, and Danialsyah Danialsyah, 'Kedudukan Rekaman Cctv Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XIV/2016 (Studi Putusan Nomor 3398/Pid.B/2017/PN.Mdn)', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4.2 (2022), 211–32 <<https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.205>>.

## Evaluasi Tantangan dan Kendala dalam Penggunaan Bukti Rekaman

Selain itu, kami juga mengevaluasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan bukti rekaman sebagai alat pembuktian dalam kasus korupsi. Salah satu tantangan utama adalah masalah autentikasi dan validasi rekaman. Dalam konteks teknologi yang berkembang pesat, semakin sulit untuk memastikan keaslian dan keandalan rekaman, terutama dengan adanya kemungkinan manipulasi atau penyimpangan.

Kendala lainnya termasuk kesulitan dalam memperoleh rekaman yang sah dan otentik, terutama dalam kasus-kasus di mana sumber rekaman tersebut tidak jelas atau tidak dapat diverifikasi. Selain itu, terdapat juga perdebatan tentang relevansi dan keabsahan bukti rekaman di pengadilan, dengan beberapa pihak mengkritik bahwa rekaman dapat dengan mudah dipalsukan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.<sup>13</sup>

Selain tantangan teknis, terdapat juga kendala praktis dalam pemrosesan dan presentasi bukti rekaman di pengadilan. Misalnya, masalah teknis seperti kualitas rekaman atau kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam rekaman tersebut dapat menghambat proses hukum dan memperlambat penyelesaian kasus.

Melalui analisis yang teliti terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan bukti rekaman, kami dapat mengidentifikasi beberapa area di mana peningkatan diperlukan. Misalnya, penting untuk memperkuat regulasi dan prosedur terkait dengan penggunaan bukti rekaman dalam proses hukum, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan teknis dari para penegak hukum dalam memverifikasi dan memvalidasi bukti rekaman. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan bukti rekaman sebagai alat pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>14</sup>

## Implikasi dan Rekomendasi

Setelah analisis temuan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi implikasi hasil penelitian dan menyusun rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan bukti rekaman dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pertama, analisis temuan dapat memberikan implikasi langsung terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Jika ditemukan bahwa bukti rekaman memiliki kesesuaian yang tinggi dan tingkat validitas yang memadai, hal ini dapat memberikan dukungan tambahan terhadap kebijakan penggunaan bukti rekaman dalam penanganan kasus korupsi. Implikasi ini dapat mempengaruhi praktik penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, serta memotivasi pihak penegak hukum untuk lebih aktif menggunakan bukti rekaman dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>15</sup>

Kedua, temuan penelitian dapat mengarah pada rekomendasi tertentu untuk meningkatkan validitas dan relevansi bukti rekaman dalam proses hukum. Rekomendasi ini dapat mencakup panduan lebih lanjut atau perubahan dalam regulasi yang mengatur penggunaan bukti rekaman. Misalnya, rekomendasi dapat ditujukan untuk memperjelas prosedur autentikasi dan validasi bukti rekaman, mengatur standar teknis untuk perekaman, atau mengatasi hambatan hukum yang mungkin muncul.

---

<sup>13</sup> Arasy Pradana Azis, 'Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>>.

<sup>14</sup> Raden Roro Fara Anissa P, 'Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)', 2020 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31328>> [accessed 8 February 2024].

<sup>15</sup> Nopsianus Max Damping, 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus', *To-Ra*, 5.3 (2019), 161–92 <<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>.

Ketiga, hasil penelitian dapat memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut atau pengembangan kebijakan terkait dengan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Jika penelitian menunjukkan bahwa bukti rekaman sangat efektif, ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teknologi lebih lanjut atau strategi implementasi yang lebih baik dalam penggunaan bukti rekaman di masa depan.

Dengan merinci implikasi dan menyusun rekomendasi yang relevan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memandu langkah-langkah perbaikan dan pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi melalui penggunaan bukti rekaman di Indonesia.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Dalam menghadapi kompleksitas kasus korupsi, bukti rekaman telah terbukti menjadi alat yang sangat relevan dan bermanfaat dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejelasan, keandalan, dan transparansi yang ditawarkan oleh bukti rekaman dapat membantu menyajikan fakta-fakta yang objektif dan mendukung proses peradilan yang adil. Namun, penting untuk diingat bahwa validitas bukti rekaman sangat penting untuk memastikan keberhasilan penggunaannya dalam pengadilan. Langkah-langkah autentikasi yang cermat, pemenuhan standar teknis dan hukum, serta pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku merupakan kunci untuk menjamin validitas bukti rekaman. Dengan demikian, sambil mengakui relevansi dan potensi bukti rekaman dalam penanganan kasus korupsi, langkah-langkah yang hati-hati dan cermat diperlukan untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat diandalkan dan diterima secara hukum.

## REFERENSI

- Akbar, Arina Manna Sikana, 'Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2020) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/577>> [accessed 8 February 2024]
- Alfiyan, Angga, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi', *PRANATA HUKUM*, 13.2 (2018) <<https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/1059>> [accessed 8 February 2024]
- As, Hanif Rabbani, 'Analisis Yuridis Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat', 2023 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43106>> [accessed 8 February 2024]
- Astuti, Sri Ayu, 'Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace)', *Pagaruyuang Law Journal*, 1.1 (2017), 44–57 <<https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.269>>
- Azis, Arasy Pradana, 'Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>>
- Choirunnisa, Cholqi, Muhammad Saifuddin, Rahma Eka Fitriani, Wahyu Vina Nurrahma, and Mahir Mahir, 'Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.6 (2022), 529–48 <<https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.152>>

---

<sup>16</sup> Sri Ayu Astuti, 'Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace)', *Pagaruyuang Law Journal*, 1.1 (2017), 44–57 <<https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.269>>.

- Damping, Nopsianus Max, 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus', *To-Ra*, 5.3 (2019), 161–92 <<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>
- Ikhsani, Syukur, and Bekti Cahyo Hidayanto, 'Analisa Forensik Whatsapp Dan LINE Messenger Pada Smartphone Android Sebagai Rujukan Dalam Menyediakan Barang Bukti Yang Kuat Dan Valid Di Indonesia', *Jurnal Teknik ITS*, 5.2 (2016), A728–36 <<https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.17271>>
- Kisworo, Windu, 'Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Di Amerika Serikat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5.1 (2018), 24–59 <<https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74>>
- Laoh, Devid Toar Henok, 'Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar Kuhp', *Lex Administratum*, 10.2 (2022) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40573>> [accessed 8 February 2024]
- Mulyadi, Mahmud, M Hamdan, and Mirza Nasution, 'Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Hukum Acara Pidana', 2017
- P, Raden Roro Fara Anissa, 'Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan Nomor: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)', 2020 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31328>> [accessed 8 February 2024]
- Rabbani, Hanif, 'Problematisasi Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat', 2023 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42947>> [accessed 8 February 2024]
- Setiawan, Iwan, Ibnu Rusydi, Anisa Rahmawati, and Siti Hasanah, 'Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10.1 (2022), 119–32 <<https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7236>>
- Sisworo, Sisworo, Marlina Marlina, and Danialsyah Danialsyah, 'Kedudukan Rekaman Cctv Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XIV/2016 (Studi Putusan Nomor 3398/Pid.B/2017/PN.Mdn)', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4.2 (2022), 211–32 <<https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.205>>
- Wuysang, Recky Vincent Oktaviano, Grace Nangoi, and Winston Pontoh, 'Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara', *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING 'GOODWILL'*, 7.2 (2016) <<https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13551>>